

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
(SPAK)**

**BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

PERIODE MEI 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik diantaranya dapat dilakukan dengan meminimalkan terjadinya korupsi; pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan; serta pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam pengambilan keputusan. Sampai dengan saat ini, korupsi menjadi fenomena yang masih melekat di instansi pemerintahan. Oleh karenanya, banyak upaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menekan korupsi di instansi pemerintahan. Hal ini dapat dilihat mulai dari ditetapkannya Peraturan Presiden tentang strategi nasional pencegahan korupsi, pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, sampai dengan diterbitkannya SNI tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Oleh karena pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka setiap K/L/D diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh instansi pemerintah dapat diterapkan melalui Persepsi Anti Korupsi melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang akan menghasilkan index persepsi anti korupsi. Index Persepsi Anti Korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terhadap stakeholders yang terkait dengan suatu instansi tentang tingkat korupsi yang terjadi pada instansi tersebut.

Mahkamah Konstitusi selaku lembaga tinggi negara juga wajib mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk itu, pada tahun ini dilakukan pengukuran persepsi anti korupsi melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada lingkungan Mahkamah Konstitusi. Selain untuk mencegah dan memberantas korupsi, Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) juga merupakan bagian dari perwujudan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

2. Tujuan

Kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) bertujuan untuk :

1. Mengukur nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
2. Sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
3. Mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Variabel Survei

Variabel Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) meliputi :

1. Diskriminasi pelayanan
Petugas memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.
2. Kecurangan pelayanan
Petugas memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan diluar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.
3. Menerima imbalan dan/atau gratifikasi
Petugas menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transportasi, rokok, kopi, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transportasi, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.
4. Pungutan liar
Petugas melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dsb).
5. Percaloan
Praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).

B. Kriteria Responden

Responden adalah seluruh pihak yang pernah mendapatkan pelayanan di unit ini. Jumlah responden yang digunakan dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini dihitung menggunakan rumus Krejcie sebagai berikut:

Rumus Krejcie

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{\{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q\}}$$

Keterangan :

- S : Jumlah sampel
- λ^2 : Lamda (faktor pengali) dengan $dk = 1$,
(taraf kesalahan yang digunakan 5%, sehingga nilai lamba 3,841)
- N : Populasi sebanyak 50
- P : $Q = 0,5$ (populasi menyebar normal)
- d : 0,05

Sehingga dari perhitungan di atas, jumlah responden minimal yang harus diperoleh adalah 45 responden.

C. Metode Pencacahan

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei elektronik melalui sistem broadcast data. Broadcast data dilakukan melalui WhatsApp, SMS, Email, dan scan barcode.

D. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Metode yang digunakan dalam pengolahan data dan analisis Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan aplikasi survei yang akan menghasilkan analisis deskriptif kuantitatif.

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Jenis Pelayanan

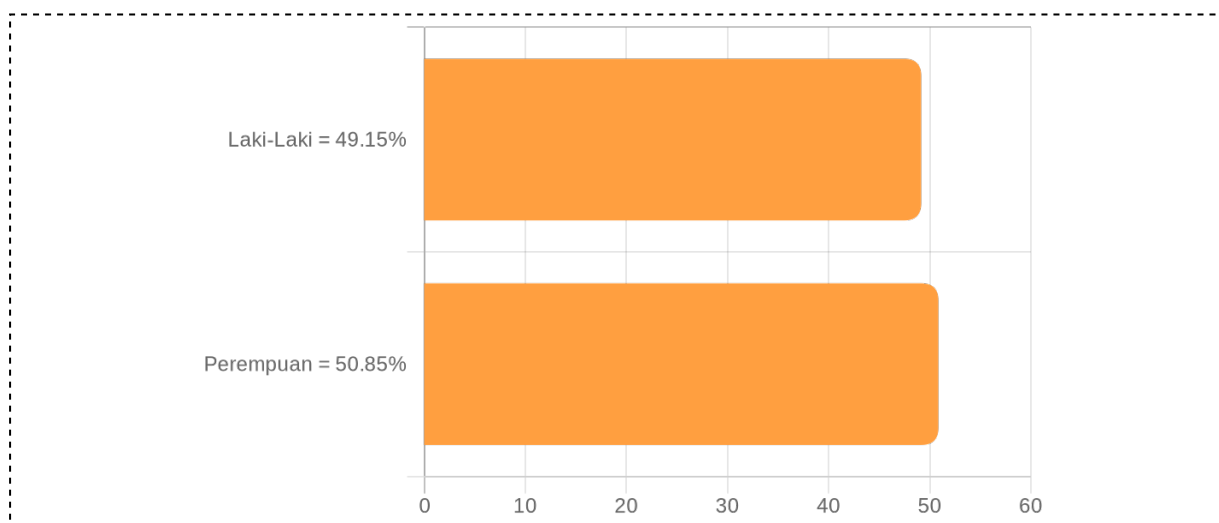
Berikut merupakan jenis layanan yang diperoleh dari Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK):

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase
1	Layanan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (Magang, Administrasi dan Poliklinik)	59	100 %
TOTAL		59	100 %

2. Profil Responden

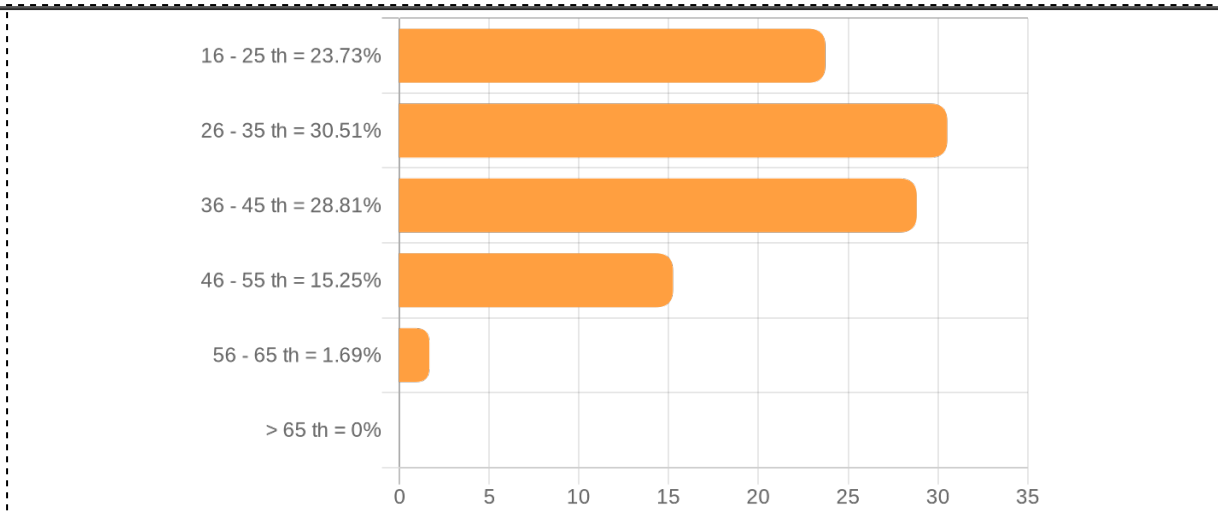
Berikut merupakan karakteristik responden yang diperoleh dari Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK):

- **Jenis Kelamin**



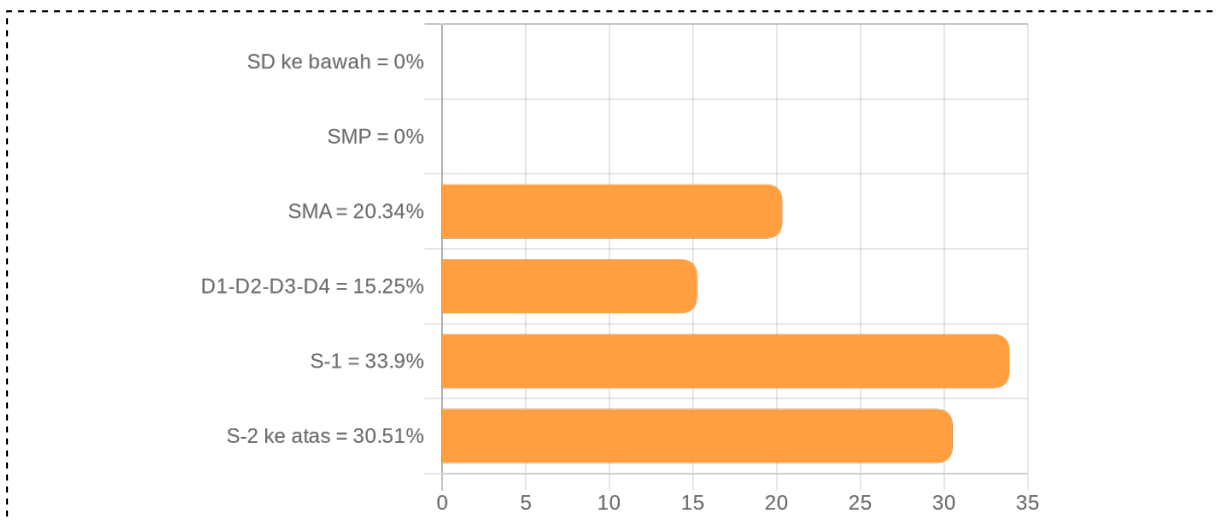
Gambar 1. Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

- **Umur**



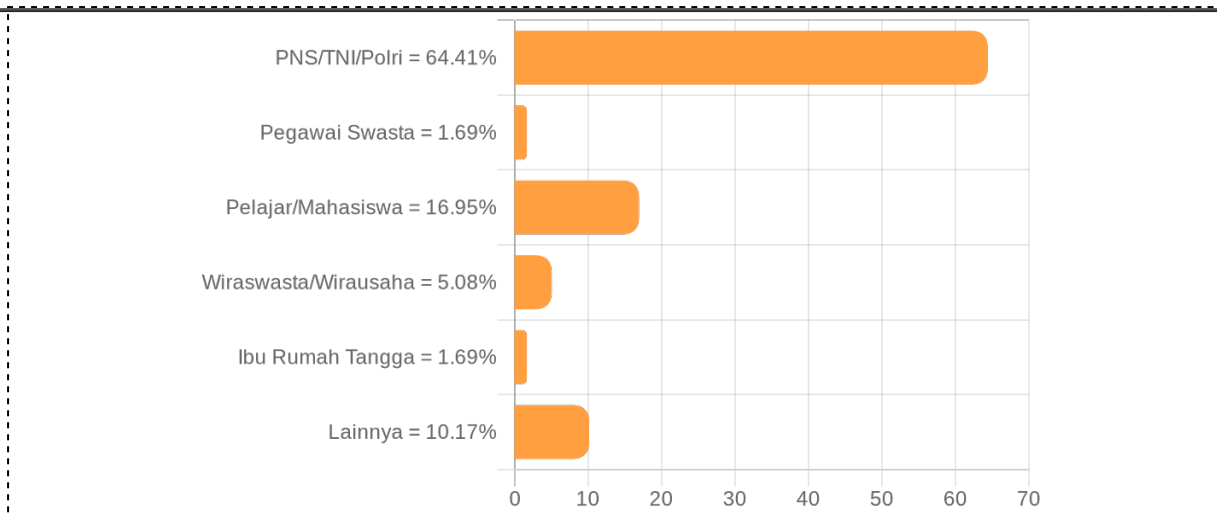
Gambar 2. Persentase Responden Berdasarkan Umur

- **Pendidikan Terakhir**



Gambar 3. Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

- **Pekerjaan Utama**



Gambar 4. Persentase Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama

Tabel 1. Persentase Responden pada Pekerjaan Utama Lainnya

No	Pekerjaan Utama Lainnya
1	Fisioterapi
2	PPNPN
3	Dokter Umum
4	Perawat
5	CPNS
6	Analisis Lab

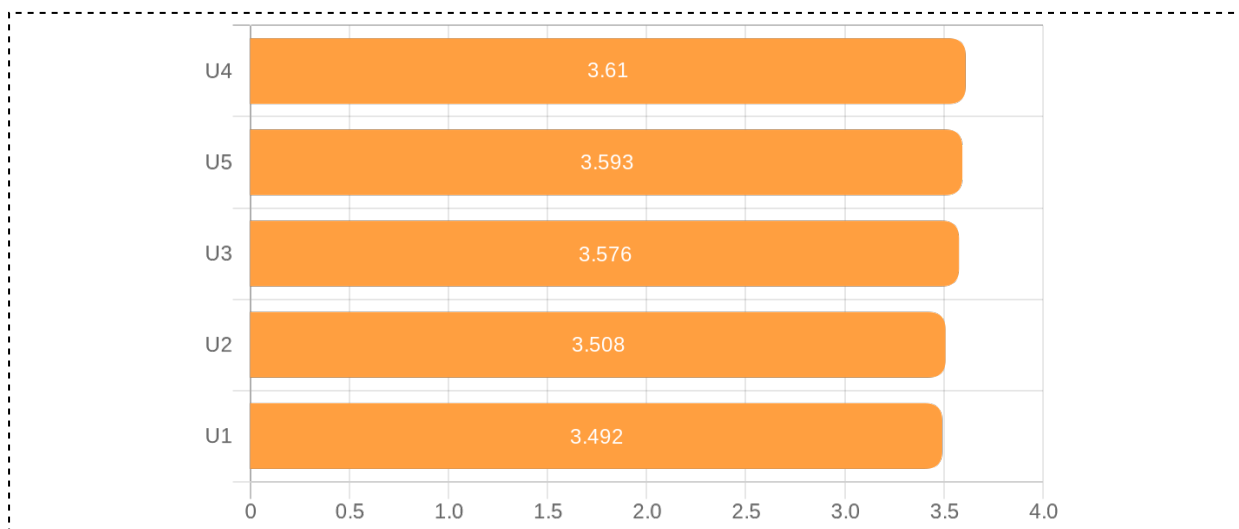
2. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mendapatkan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar **3.556**, dengan predikat **Sangat Baik**. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 2. Nilai Unsur Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

No	Unsur	Nilai Indeks	Predikat
1	U1. Diskriminasi pelayanan	3.492	Baik
2	U2. Kecurangan pelayanan	3.508	Baik
3	U3. Menerima imbalan dan/atau gratifikasi	3.576	Sangat Baik
4	U4. Pungutan liar	3.61	Sangat Baik
5	U5. Percaloan	3.593	Sangat Baik
Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi		3.556	Sangat Baik
Nilai Konversi		88.9	Sangat Baik

Nilai unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi apabila diurutkan berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

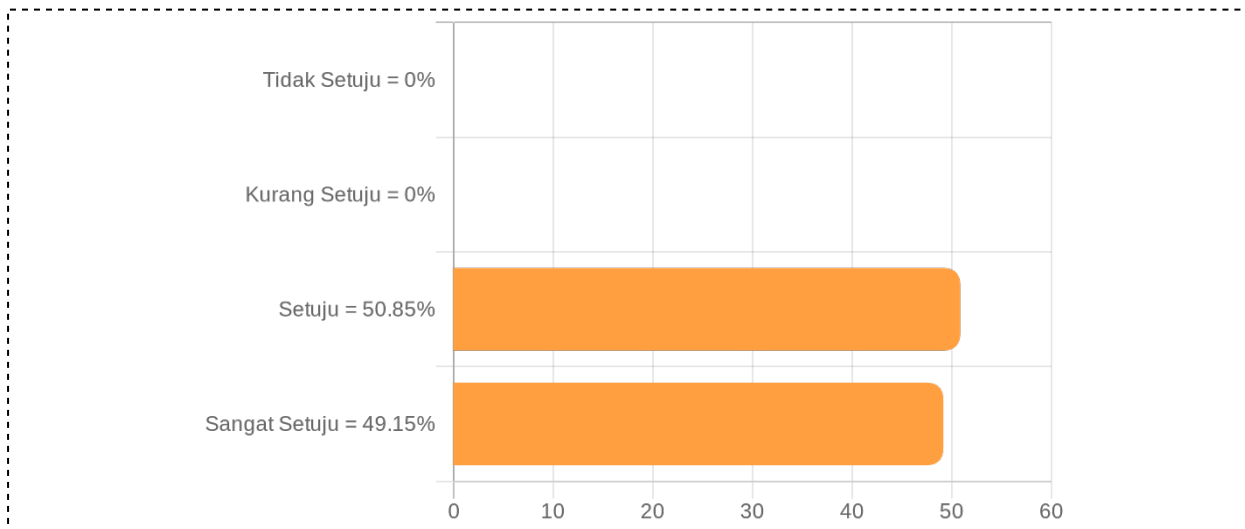


Gambar 5. Grafik Unsur Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

3. Pembahasan Unsur

Unsur yang dipakai dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui predikat anti korupsi pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Berikut adalah pembahasan mengenai jumlah persentase persepsi responden di setiap unsur:

U1. Diskriminasi pelayanan

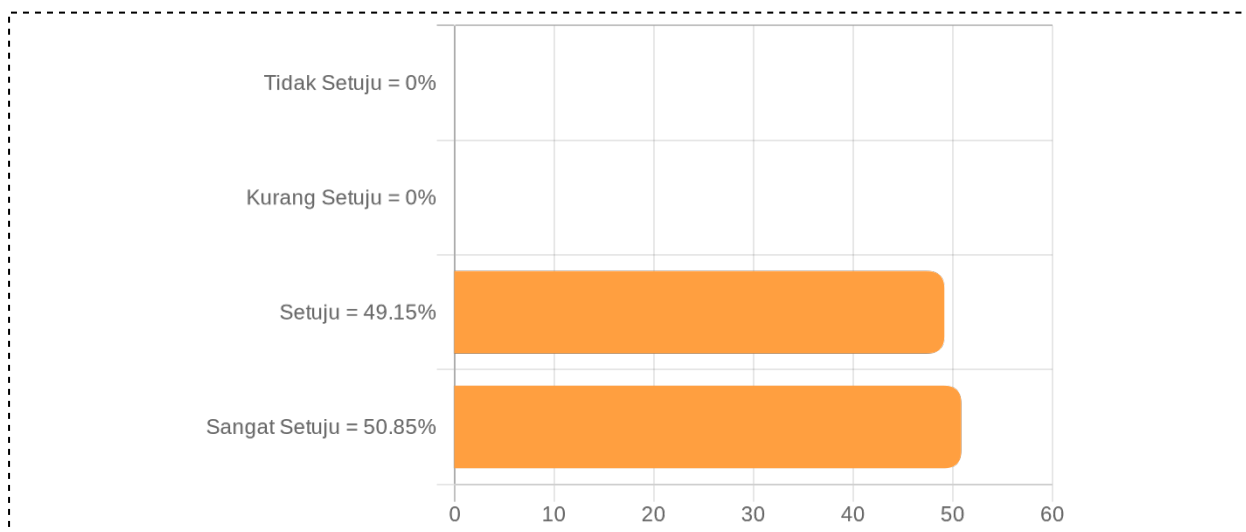


Gambar 6. Grafik Unsur Diskriminasi pelayanan

Tabel 3. Persentase Responden pada Unsur Diskriminasi pelayanan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0 %
2	Kurang Setuju	0	0 %
3	Setuju	30	50.85 %
4	Sangat Setuju	29	49.15 %
TOTAL		59	100 %

U2. Kecurangan pelayanan

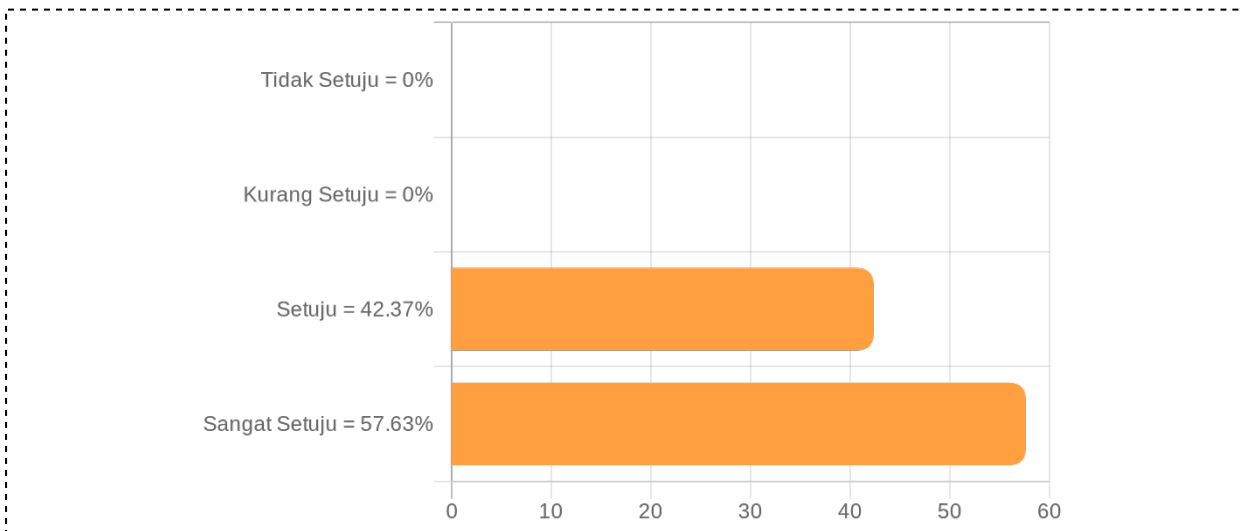


Gambar 7. Grafik Unsur Kecurangan pelayanan

Tabel 4. Persentase Responden pada Unsur Kecurangan pelayanan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0 %
2	Kurang Setuju	0	0 %
3	Setuju	29	49.15 %
4	Sangat Setuju	30	50.85 %
TOTAL		59	100 %

U3. Menerima imbalan dan/atau gratifikasi

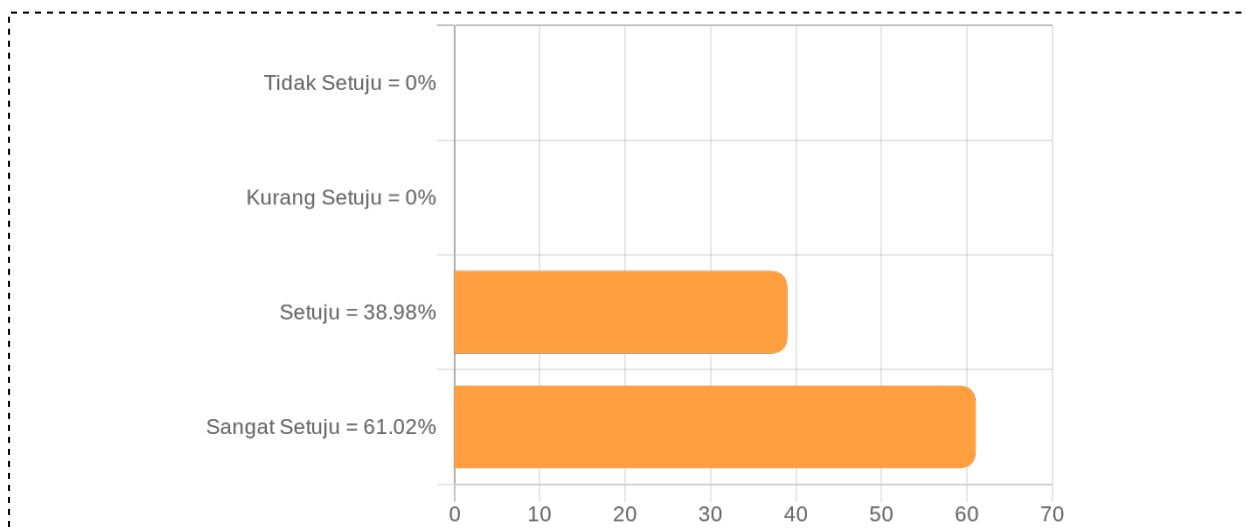


Gambar 8. Grafik Unsur Menerima imbalan dan/atau gratifikasi

Tabel 5. Persentase Responden pada Unsur Menerima imbalan dan/atau gratifikasi

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0 %
2	Kurang Setuju	0	0 %
3	Setuju	25	42.37 %
4	Sangat Setuju	34	57.63 %
TOTAL		59	100 %

U4. Pungutan liar

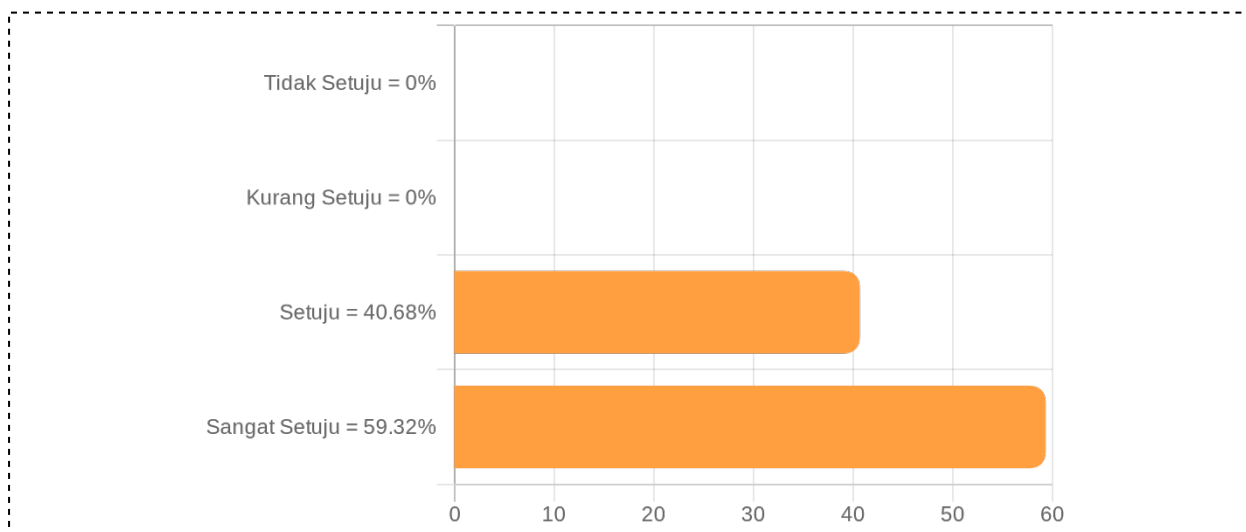


Gambar 9. Grafik Unsur Pungutan liar

Tabel 6. Persentase Responden pada Unsur Pungutan liar

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0 %
2	Kurang Setuju	0	0 %
3	Setuju	23	38.98 %
4	Sangat Setuju	36	61.02 %
TOTAL		59	100 %

U5. Percaloan



Gambar 10. Grafik Unsur Percaloan

Tabel 7. Persentase Responden pada Unsur Percaloan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0 %
2	Kurang Setuju	0	0 %
3	Setuju	24	40.68 %
4	Sangat Setuju	35	59.32 %
TOTAL		59	100 %

4. Saran Responden

Unsur yang dipakai dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dapat Saran responden mengenai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagai berikut:

Tabel 8. Saran Masukan Responden

No	Isi Saran
1	Mohon dapat dipertahankan kinerja yang baik. Terima kasih
2	Pelayanan sudah sesuai
3	sudah baik, semoga terus dapat dipertahankan

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

4	Pelayanan yang diberikan oleh Biro SDMO pada program magang yang saya ikuti tidak pernah menunjukkan bentuk atau indikasi korupsi maupun gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai MK. Saran saya tidak merujuk pada pengawasan KKN namun lebih kepada keterbukaan informasi. Agar pengunjung lebih mengetahui profil pegawai beserta dengan gelar akademis yang dimiliki dapat di cantumkan pada website resmi mkri id. Sebagai contoh, di awal, saya kesulitan merasa kesulitan untuk mengetahui gelar akademik Plt Sekjen saat ini yaitu bapak Heru Setiawan. Bagi beberapa kesempatan penting juga menampilkan latar belakang keilmuan pegawai di MK melalui gelar akademik yang jelas.
5	Semoga biro SDMO kedepannya lebih baik
6	Pelayanan sudah bagus tanpa pungli dan sejenisnya.
7	Semoga survei juga menggambarkan nurani yang anti terhadap korupsi. Saya yakin dan percaya bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang independent serta jauh dari korupsi, Sebab orang di dalam nya banyak yang berpengetahuan tinggi
8	Kegiatan magang terlaksana dengan sangat baik, ditambah para pembina program magang sangat antusias dan responsif terhadap para peserta magang terlepas dari kesibukan utama mereka di MK. Sukses selalu MKRI. Salam Konstitusi.
9	Saya pernah mengikuti magang di MKRI Agustus tahun lalu, dan merasa sangat puas atas segala pelayanan dan pembelajaran yang telah diberikan dari seluruh staff MKRI kepada kami sebagai peserta magang. Terima kasih banyak atas dedikasi keluarga besar MKRI untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia.
10	Lanjutkan yg terbaik
11	Pelayanan yang diberikan sudah sangat baik dan bebas dari pungli
12	Terima kasih telah mengadakan survei seperti ini yang dapat memberikan sisi yang lebih transparan terhadap kinerja biro SDM dan organisasi dengan jawaban yang diberikan oleh para responden
13	Biro SDMO semakin tanggap dan meningkatkan layanan Biro SDMO, sesuai dengan tupoksinya, melalui pelatihan dan diskusi dan belajar terus menerus dalam hal kepegawaian dan konseling.
14	tingkatkan terus pelayanan sdm
15	Izin beropini saya mahasiswa magang, menurut saya Layanan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi .Magang, Administrasi dan Poliklinik. sangat menyambut baik, dari administrasi sampai tahap pelaksanaan magang.
16	Agar terus ditingkatkan dan dipertahankan kualitas pelayanan Biro SDMO, terima kasih.
17	Tingkatkan terus pelayanan.
18	Semakin bagus pelayanannya
19	untuk lebih meningkatkan sosialisasi terkait pelayanan dan aturan terkait sdm.
20	Tingkatkan lagi seluruh aspek pelayanan . Keren bro
21	Kinerja Biro SDMO sudah sangat sesuai SOP yang sudah di tetapkan
22	Terbaik di atas yg terbaik
23	tidak ada
24	Selama ini pelayanan cukup baik
25	Semangat dan maju terus biro sdm.
26	Semangat dan maju terus biro sdm

27	.
28	Komunikasikan lebih cepat dan aktual
29	Yang sudah bagus mohon dapat dipertahankan.
30	Sudah bagus tetapi harus terus ditingkatkan lagi
31	Semoga Biro SDM ke depannya tambah sukses dalam hal pelayanan yang semakin lebih baik.
32	Semangat terus untuk SDMO. Tingkatkan layanan dan pertahankan yang sudah bagus.
33	Selalu Solid
34	Mohon ditingkatkan.
35	Sudah cukup baik
36	semangat
37	.
38	Pelayanan di Biro SDM dan Organisasi telah dilaksanakan dengan baik.
39	pertahankan prestasinya

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan hasil dari Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), maka rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

Unsur	:	U1. Diskriminasi pelayanan
Faktor yang Mempengaruhi	:	-
Rencana Tindak Lanjut	:	<p style="text-align: center;">Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan pembangunan budaya anti korupsi (Januari - Desember 2023) 2. Sosialisasi budaya (kampanye) anti korupsi (Januari - Desember 2023) 3. Melanjutkan budaya transparansi dalam setiap kegiatan (Januari - Desember 2023) 4. menyempurnakan SOP pada masing-masing sub-Bagian (Januari - Desember 2023) 5. Sosialisasi kode etik pegawai (Usulan upload kode etik pada dashboard pegawai) (Januari - Desember 2023) 6. Monitoring dan evaluasi komitmen Pakta Integritas pegawai (Juni dan Desember 2023)
Waktu	:	December 2023
Penanggung Jawab	:	Seluruh Pegawai Biro Sumber Daya dan Manusia

BAB IV DATA SURVEI

A. Data Responden

	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Utama
Responden 1	Perempuan	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 2	Perempuan	26 - 35 th	D1-D2-D3-D4	PNS/TNI/Polri
Responden 3	Perempuan	46 - 55 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 4	Perempuan	16 - 25 th	SMA	Pelajar/Mahasiswa
Responden 5	Perempuan	16 - 25 th	SMA	Pelajar/Mahasiswa
Responden 6	Laki-Laki	16 - 25 th	SMA	Pelajar/Mahasiswa
Responden 7	Perempuan	26 - 35 th	S-1	PNS/TNI/Polri
Responden 8	Laki-Laki	46 - 55 th	S-1	PNS/TNI/Polri
Responden 9	Laki-Laki	26 - 35 th	SMA	Pelajar/Mahasiswa
Responden 10	Perempuan	26 - 35 th	S-1	PNS/TNI/Polri
Responden 11	Laki-Laki	16 - 25 th	SMA	Pelajar/Mahasiswa
Responden 12	Perempuan	46 - 55 th	S-1	Wiraswasta/Wirausaha
Responden 13	Perempuan	16 - 25 th	SMA	Pelajar/Mahasiswa
Responden 14	Laki-Laki	46 - 55 th	D1-D2-D3-D4	PNS/TNI/Polri
Responden 15	Laki-Laki	16 - 25 th	D1-D2-D3-D4	PNS/TNI/Polri
Responden 16	Perempuan	16 - 25 th	S-1	Pelajar/Mahasiswa
Responden 17	Perempuan	16 - 25 th	SMA	Pelajar/Mahasiswa
Responden 18	Perempuan	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 19	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	PNS/TNI/Polri
Responden 20	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 21	Perempuan	16 - 25 th	SMA	Pelajar/Mahasiswa
Responden 22	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 23	Perempuan	36 - 45 th	S-1	PNS/TNI/Polri
Responden 24	Perempuan	26 - 35 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 25	Perempuan	46 - 55 th	S-1	PNS/TNI/Polri
Responden 26	Perempuan	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 27	Laki-Laki	26 - 35 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

Responden 28	Perempuan	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 29	Laki-Laki	26 - 35 th	D1-D2-D3-D4	Lainnya
Responden 30	Laki-Laki	46 - 55 th	S-1	Lainnya
Responden 31	Laki-Laki	46 - 55 th	SMA	PNS/TNI/Polri
Responden 32	Perempuan	16 - 25 th	SMA	Pelajar/Mahasiswa
Responden 33	Laki-Laki	56 - 65 th	S-1	Wiraswasta/Wirusaha
Responden 34	Perempuan	36 - 45 th	S-1	Lainnya
Responden 35	Perempuan	26 - 35 th	D1-D2-D3-D4	Lainnya
Responden 36	Perempuan	26 - 35 th	S-1	PNS/TNI/Polri
Responden 37	Perempuan	46 - 55 th	S-1	PNS/TNI/Polri
Responden 38	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	PNS/TNI/Polri
Responden 39	Laki-Laki	26 - 35 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 40	Laki-Laki	46 - 55 th	SMA	Pegawai Swasta
Responden 41	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 42	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 43	Laki-Laki	26 - 35 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 44	Laki-Laki	36 - 45 th	S-1	PNS/TNI/Polri
Responden 45	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	PNS/TNI/Polri
Responden 46	Perempuan	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 47	Laki-Laki	16 - 25 th	S-1	Wiraswasta/Wirusaha
Responden 48	Laki-Laki	16 - 25 th	D1-D2-D3-D4	Lainnya
Responden 49	Perempuan	26 - 35 th	D1-D2-D3-D4	Lainnya
Responden 50	Laki-Laki	36 - 45 th	S-1	PNS/TNI/Polri
Responden 51	Perempuan	16 - 25 th	D1-D2-D3-D4	PNS/TNI/Polri
Responden 52	Laki-Laki	16 - 25 th	D1-D2-D3-D4	PNS/TNI/Polri
Responden 53	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 54	Perempuan	36 - 45 th	S-1	PNS/TNI/Polri
Responden 55	Perempuan	26 - 35 th	SMA	Ibu Rumah Tangga
Responden 56	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 57	Perempuan	26 - 35 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri
Responden 58	Perempuan	26 - 35 th	S-1	PNS/TNI/Polri
Responden 59	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri

**** Data Nama Lengkap, Email dan Nomor Telepon tidak ditampilkan untuk menjaga kerahasiaan data responden.**

B. Capture Aplikasi Survei



The screenshot shows the survey application interface. At the top, there is a header with the Mahkamah Konstitusi logo and the title "SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA". Below the header, there is a paragraph of text explaining the purpose of the survey and the confidentiality of the responses. A large orange button labeled "IKUT SURVEI" is positioned at the bottom of the form.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi di Mahkamah Konstitusi, Bapak/Ibu diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai responden. Kami mengharapkan kejujuran, keterbukaan, dan jawaban yang objektif agar hasil dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya.

Kerahasiaan informasi Bapak/Ibu dijamin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jawaban Bapak/Ibu akan diolah secara keseluruhan responden (bukan individu) sehingga tidak akan berdampak pada Bapak/Ibu.

Kami harap Bapak/Ibu bersedia meluangkan waktu sekitar 15-30 menit untuk mengisi survei ini. Partisipasi Bapak/Ibu besar artinya bagi perbaikan organisasi/lembaga ini dan bentuk nyata peran serta Bapak/Ibu dalam upaya mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi di Mahkamah Konstitusi.

Atas kesediaan Saudara kami sampaikan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya.
Jika ada yang perlu dikonfirmasi terkait survei ini dapat menghubungi WhatsApp +62 895-3362-29033

Hormat kami,
Tim Survei Persepsi Anti Korupsi

IKUT SURVEI

C. Sertifikat Survei

Link dan barcode untuk validasi hasil Survei:

<https://spak.surveiku.com/validasi-sertifikat/4ad67e0b-49d0-48e3-b535-13e0ad6356ae>

